

## **Penerapan Sistem Pemerintahan Islam untuk Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Umat**

**Askana Fikriana<sup>1</sup>, Selma Safitri<sup>2</sup>, Lilis Sofyaa<sup>3</sup>, Shinta Sylviani<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Bengkalis

e-mail: [afikriana20@gmail.com](mailto:afikriana20@gmail.com)<sup>1</sup>, [selmasafitribks@gmail.com](mailto:selmasafitribks@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[lilissofyaa@gmail.com](mailto:lilissofyaa@gmail.com)<sup>3</sup>, [shintasylviani@gmail.com](mailto:shintasylviani@gmail.com)<sup>4</sup>

### **Abstrak**

Pemerintahan dalam Islam merupakan salah satu topik yang menarik untuk dibahas mengingat hari ini banyak negara yang menggunakan segala kelebihan serta kekurangannya mencari model pemerintahan yang ideal dan bisa menggunakan mudah-mudahan diterapkan. Pemerintahan dalam Islam bersandar pada prinsip-prinsip dari Al-Qur'an serta Sunnah. Penelitian ini menggunakan metode Literature Review. Yaitu metode penelitian yang mencakup pengumpulan, membaca, mencatat, dan pengolahan sumber pustaka seperti jurnal yang terkait dengan topik penelitian. Pencarian literatur baik internasional maupun nasional. Penerapan sistem pemerintahan Islam tampak berbagai tema-tema diskusi keislaman, seperti penegakan syariat Islam, hubungan agama dan negara, Islam politik, dan lain sebagainya. Secara internal, terdapat ketegangan terhadap wacana penerapan sistem pemerintahan Islam, senantiasa mengalami pergumulan secara dialektis antara muslim nasionalis dan muslim sekuler. Penerapan sistem pemerintahan Islam dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat. Konsep pemerintahan Islam mencakup kepemimpinan yang adil, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat. Penerapan pemerintahan Islam dapat dilakukan dengan mengadopsi prinsip-prinsip Islam dalam sistem pemerintahan. Penerapan pemerintahan Islam memiliki beberapa keuntungan, seperti mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. Tidak hanya terbatas pada negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sistem pemerintahan Islam dapat diterapkan di negara-negara dengan berbagai latar belakang agama dan budaya.

**Kata kunci:** *Sistem Pemerintahan Islam, Keadilan, Kesejahteraan*

### **Abstract**

Government in Islam is one of the interesting topics to discuss considering that today many countries are using all their strengths and weaknesses to find the ideal government model and can be easily implemented. Government in Islam is based on the principles of the Qur'an and Sunnah. This research uses Literature Review. That is a research method that includes collecting, reading, recording, and processing library sources such as journals related to the research topic. literature search both internationally and nationally. the application of the Islamic government system appears various themes of Islamic discourse, such as the enforcement of Islamic shari'a, the relationship between religion and the State, political Islam and so on. Internally, the backlash against the discourse on the implementation of the Islamic system of government has always experienced a dialectical struggle between nationalist Muslims and secular Muslims. The implementation of an Islamic system of government can realize justice and the welfare of the people. The concept of Islamic governance includes just leadership, social justice, and the welfare of the people. The implementation of Islamic governance can be done by adopting Islamic principles in the government system. The implementation of Islamic governance has several advantages, such as realizing social justice and improving the welfare of the people. It is not only limited to countries where the

majority of the population is Muslim. Islamic government systems can be applied in countries with various religious and cultural backgrounds

**Keywords :** *Islamic Governance System, Justice, Welfare*

## PENDAHULUAN

Pemerintahan dalam Islam merupakan salah satu topik yang menarik buat dibahas mengingat hari ini banyak negara yang menggunakan segala kelebihan serta kekurangannya mencari model pemerintahan yang ideal dan bisa menggunakan mudah buat di terapkan. Pemerintahan dalam bersandar pada prinsip-prinsip dari Al-Qur'an serta Sunnah tanpa melihat apakah prinsip-prinsip ini sejalan atau berbeda dengan sistem pemerintahan lain, serta tanpa memperhatikan sejarah yang memiliki dampak serta memunculkan keadaan-keadaan yang tidak sama serta di era kini yang relatif bercampur dengan prinsip – prinsip tersebut.(Mairizal, 2018)

Jika berbicara tentang pemerintahan Islam, kita akan paling tidak berhadapan dengan istilah "negara", "penguasa", dan "strategi" yang digunakan dalam struktur pemerintahan. Penguasa penting untuk mengatur segala kepentingan bangsa. Suatu negara akan hidup dengan keteraturan dan ketertiban, dan orang-orang akan bekerja sama untuk membangun satu sama lain. Dengan adanya suatu sistem pemerintahan, bangsa cenderung mudah berkembang dan akan menjadi modal awal untuk kemajuan bangsa (Gani, 2014).

Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (An-Nisā' [4]:59).

Ayat ini menyebutkan bahwa sistem pemerintahan Islam harus berdasarkan di prinsip ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya, dan pada ulil amri (pemimpin yang adil). dalam mengambil keputusan, ulil amri harus bermusyawarah menggunakan warga dan mengedepankan kepentingan umat.Selain itu, ayat ini pula menjelaskan bahwa Jika terjadi perselisihan di antara umat, maka wajib dikembalikan pada Allah dan Rasul-Nya. Hal ini membagikan bahwa sistem pemerintahan Islam wajib berlandaskan pada hukum Islam yang adil serta berkeadilan (Srifariyati, 2019).

Beberapa fungsi mutlak yang wajib nampak pada diri pemimpin sebuah negara antara lain: mengatur ketertiban awam pada rangka mencapai visi serta misi beserta, membentuk sebuah keharmonisan seluruh elemen lapisan masyarakat, menjamin kehidupan rakyat serta menciptakan kekuatan internal bangsa serta mengklaim akan tegaknya suatu keadilan tanpa pandang bulu. berdasarkan fakta sejarah yang kemudian banyak di benarkan oleh semua ahli sejarah bahwa sosok yang hingga saat ini paling berpengaruh dalam menyampaikan warna baru tentang konsep suatu pemerintahan yaitu Muhammad (Rizal, 2021).

Dalam hal ini, Sistem pemerintahan Islam merupakan sistem yang bersumber berasal ajaran Islam. Sistem ini memiliki prinsip-prinsip yang dapat diterapkan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya ialah kedaulatan Allah SWT, syura, musyawarah, amar ma'ruf nahi munkar, dan keadilan sosial. Serta bisa mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat sebab sistem ini berasaskan di nilai-nilai ilahiyah yang universal serta abadi. Nilai-nilai tadi diantaranya artinya keadilan, persamaan, kebebasan, serta tanggung jawab. Atas dasar inilah peneliti tertarik untuk membahas penelitian ini lebih dalam pembahasan dan hasil penelitian didalam penelitian ini.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan adalah Literature Riview. Yaitu metode penelitian yang mencakup pengumpulan, membaca, mencatat, dan pengolahan sumber pustaka seperti jurnal yang terkait dengan topik penelitian. pencarian literatur baik internasional maupun nasional. Selanjutnya penulis menganalisa dengan cara mengkaji undang-undang di Indonesia tentang “Penerapan Sistem Pemerintahan Islam Untuk Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Umat”

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemerintahan Islam menurut Imam Khomeni didalam jurnal Hartati yang berjudul Konsep Pemerintahan Islam Imam Khomeini, mengatakan bahwa konsep-konsep tentang hubungan penguasa serta yang dikuasai (Pemerintahan dan warga negara), seperti hak hayati, hak-hak wanita, kesejahteraan, sosial, perbudakan, keadilan, persamaan insan, kebebasan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan berserikat, hak berpartisipasi dalam pemerintahan, serta lain-lain. Umat Islam wajib terjun ke percaturan politik buat mengarahkan kehidupan masyarakat Islam yang sejalan dengan aturan-hukum ilahi, baik pada hal berkaitan menggunakan pemerintahan, kenegaraan juga kemasyarakatan. Adapun gagasan yang tampak pada gagasan politik artinya tentang kekuasaan. Gagasan ini memberikan keleluasaan kepada para ulama untuk berpolitik, yaitu ambil bagian secara aktif pada pemerintahan, kenegaraan dan masyarakat. pada dalamnya tercakup gagasan hubungan masyarakat menggunakan pemerintahan secara integral (Hartati, 2017).

Sedangkan menurut Ibnu Khaldun didalam jurnal Hanna Widayani dengan judul Konsep Pemerintahan Islam dalam Pandangan Ibnu Khaldun (Analisis terhadap Teori ‘Ashabiyyah) menjelaskan bahwa Sistem pemerintah islam pada hakekatnya merupakan pemerintahan yang berlandaskan agama yang memerintahkan rakyatnya sesuai dengan petunjuk agama baik dalam hal keduniawian atau akhirat. Menurutnya contoh pemerintahan seperti inilah yang terbaik, karena dengan hukum yang bersumber berasal ajaran agama akan terjamin tidak saja keamanan serta kesejahteraan pada dunia namun juga pada akhirat. serta karena yg dipakai sebagai asas kebijaksanaan pemerintahan itu merupakan ajaran kepercayaan , khususnya Islam, maka kepala negara disebut Khalifah dan Imam (Widayani, 2018).

Penerapan sistem pemerintahan Islam tampak berbagai tema-tema diskursus keislaman, seperti penegakan syari’at Islam relasi agama serta Negara, Islam politik serta lain sebagainya. Secara internal, kias balik terhadap wacana penerapan sistem pemerintahan Islam, senantiasa mengalami pergumulan secara dialektis antara muslim nasionalis dan muslim sekuler. Muslim nasionalis menghendaki berasaskan Islam dan mengimplikasikan berdirinya Negara Islam sebagai medium penerapan sistem pemerintahan Islam, menggunakan alasan bahwa secara umum dikuasai bangsa artinya Muslim. Sedangkan muslim sekuler menjadi antitesa asal muslim nasionalis adalah kelompok yang tak menghendaki Negara berdasarkan Islam dan didirikannya Negara Islam, menggunakan alasan bahwa bangsa Indonesia tidak hanya dibangun sang orang Islam, tapi non muslim jua turut andil mendirikan Negara (Abdullah, 2017).

Penerapan pemerintahan Islam dapat dilakukan dengan cara mengadopsi prinsip-prinsip Islam dalam sistem pemerintahan. Beberapa prinsip Islam yang dapat diadopsi dalam sistem pemerintahan antara lain:

### **Syura (musyawarah)**

merupakan aturan dasar landasan pemerintahan dalam Islam yang melawan kezaliman penguasa dengan pendapatnya, serta membatasi sikap individu. Syura, mirip yang kami sebutkan sebelumnya, terkait dengan apa yang tak disebutkan pada kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Islam sudah menyetujui prinsip musyawarah serta membiarkan orang-orang buat memilih metode buat memperluas dan memperhitungkan keadaan dan kondisi yang tidak sama (Sood, 2021).

## **Keadilan**

Adil yang terambil berasal bahasa Arab 'adl, memiliki arti sama, persamaan yang merupakan adil itulah yang menjadikan pelakunya tidak berpihak. Keadilan diungkapkan oleh Al-Alquran menggunakan kata lain yg lebih awam, qisth, arti Sumbernya merupakan bagian. keadilan dalam konteks kepemimpinan artinya memutuskan hukum dengan adil menggunakan memelihara hak-hak dan prestise kemanusiaan. pada konsepsi Alquran yang dimaksud memutuskan hukum artinya melaksanakan aturan dan berada dibawah hukum Allah serta aturan-aturan Allah jua yang menjadi acuan Jika terjadi perselisihan.

## **Kepemimpinan yang adil**

Merupakan suatu perilaku untuk memperlakukan seorang sesuai menggunakan haknya. serta yang menjadi hak setiap orang artinya diakui dan diperlakukan sinkron menggunakan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, kepercayaan , serta golongan. Keadilan adalah suatu bentuk kondisi kebenaran ideal secara moral akan sesuatu hal, baik itu menyangkut benda ataupun orang. berdasarkan asal sebagian besar teori, kepemimpinan adil mempunyai tingkat kepentingan yang akbar. Kebanyakan orang percaya Jika ketidakadilan wajib segera dilawan dan dieksekusi, serta banyak gerakan sosial serta politik yang ada pada semua global memperjuangkan menegakkan keadilan (Harisah, 2020).

## **Kesejahteraan umat**

pada UU No. 11 tahun 2009 dikutip pada jurnal Amirus Sodiq, Konsep Kesejahteraan dalam Islam mengatakan bahwa perihal Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan social ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial rakyat negara supaya bisa hidup layak serta mampu membuatkan diri, sehingga bisa melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu, serta berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemda, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap masyarakat negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, agunan sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan social (Sodiq, 2015).

## **Kesatuan Umat**

Persatuan merupakan sebuah keniscayaan sebab kaum beriman bersaudara sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi Muhammad serta para sahabat. Layaknya satu tubuh yang Bila keliru satu anggota tubuh sedang sakit, maka yg lainnya juga mencicipi kesakitan juga. kebalikannya, perpecahan umat Islam merupakan refleksi pencerahan kolektif umat yang dikuasai oleh setan dan hawa nafsu yang menyesatkan. Dalam hal ini KH. Hasyim Asy`ari dikutip oleh Ahmad Khoirul Fata di jurnal dengan judul Kontekstualisasi Pemikiran KH. Hasyim Asy`Ari Tentang Persatuan Umat Islam mengatakan bahwa persatuan akan mendatangkan kebaikan bagi umat manusia serta menghindarkan berasal bahaya yang mengancam. Persatuan merupakan prasyarat utama buat membentuk kemakmuran sekaligus mendorong terjalannya moral welas asih antar sesama umat. sebaliknya, perpecahan dan memutuskan korelasi persaudaraan ialah perbuatan dosa akbar dan kejahatan yang keji (Fata, 2014).

## **SIMPULAN**

Penerapan sistem pemerintahan Islam dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat. Konsep pemerintahan Islam mencakup kepemimpinan yang adil, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat. Penerapan pemerintahan Islam dapat dilakukan dengan mengadopsi prinsip-prinsip Islam dalam sistem pemerintahan. Penerapan pemerintahan Islam memiliki beberapa keuntungan, seperti mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. Tidak hanya terbatas pada negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. System pemerintahan islam dapat diterapkan dinegara-negara dengan berbagai latar belakang agama dan budaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, K. F. (2014), Kontekstualisasi Pemikiran KH. Hasyim Asy`Ari Tentang Persatuan Umat Islam, MIQOT Vol. XXXVIII No. 2 : 319-334 <http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v38i2.65>.
- Amirus, S. (2015) Konsep Kesejahteraan dalam Islam, EQUILIBRIUM, Vol. 3, No. 2, (12): 380-405. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v3i2.1268>
- Hanna, W. (2018). Konsep Pemerintahan Islam dalam Pandangan Ibnu Khaldun (Analisis terhadap Teori 'Ashabiyyah). Jurnal Manthiq: Vol III No 2: 8-20
- Harisah. (2020). Konsep islam tentang keadilan dalam muamalah. Syar'ie, Vol. 3 No. 2 :172-185
- Hartati. (2017) Konsep Pemerintahan Islam Imam Khomeini, KALAM Jurnal Agama dan Sosial Humaniora, Vol. 5. No. 1. 60-76 <https://journal.lsamaaceh.com/index.php/kalam/article/view/10>.
- Jamaluddin, A. (2017). Proyeksi Penerapan Sistem Pemerintahan Islam Di Negara Republik Indonesia. Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law. Volume VI No. 1: 17-30
- Jumat, G. (2014) Konsep pemerintahan dalam Al-Qur'an: Analisis Makna Khalifah dalam perspektif Fiqh Politik, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 11, No. 1: 173-189 <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i1.346.173-191>
- M. Sood. (2021) The Implementation of Safeguard In Efforts to Protect Domestic Industrial Products. Ius Kajian Hukum Dan Keadilan. Vol. 9 no. 1: 34-51 <https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.833>.
- Saepul, R. (2021). Pemerintahan Dalam Islam (Telaah Buku Fikrotul Idari Fiil Islam Karya Muhammad Nasyir) Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja. Volume 11, No. 2. Oktober 2021: 231-239. <https://10.0.131.165/jiwbp.v11i2.%202200>.
- Srifariyati. (2019), Prinsip Kepemimpinan dalam Perspektif QS. An-Nisa: 58-59. Jurnal Madaniyah, Volume 9 Nomor 1 Edisi 1 (1). 41-61
- T. Mairizal. (2018). Stabilitas Pemerintahan Dalam Perspektif Alquran. Jurnal At-Tibyan Volume 3 No. 2. Desember <https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v3i2.647>